

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ariestya Nur Agustiningtyas
N I M : 13440609
Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2017

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ariesty Nur Agustiningtyas

N I M : 13440609

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2017

HALAMAN PENGESAHAN

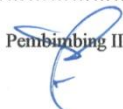
Judul : "Analisis Kinerja Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah (APBD)
Ditinjau Dari Rasio Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015"
Nama : Ariestya Nur Agustiningtyas
NIM : 13440609
Program Studi : Akuntansi S-1

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo,.....

Pembimbing I


(Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W. M.M., Ak., CA.)
NIK. 19670822 199705 12

Pembimbing II


(Arif Hartono, SE, M. SA)
NIK. 19780120 200109 13

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

(TITI RAPINI, S.E., M.M.)
NIP. 19630505 199003 2 003

Dosen Penguji,



(Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W. M.M., Ak., CA.)
NIK. 19670822 199705 12



(Arif Hartono, SE, M. SA)
NIK. 19780120 200109 13


(Slamet Santoso, SE, M.Si)
NIK. 19701016 199904 12

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ditinjau dari rasio keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari website resmi Provinsi Jawa Timur www.dpjk.depkeu.go.id. Penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan daerah sebagai alat untuk menganalisis yaitu rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung.

Hasil penelitian pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tingkat kemandirian yang bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah tersebut telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio desentralisasi fiskal pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah artinya tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan masih belum terealisasi. Rasio efisiensi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah.

Kata kunci : *Rasio kemandirian daerah, Rasio desentralisasi fiskal, Rasio efisiensi, Rasio belanja langsung, Rasio Belanja tidak langsung.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga terselesaikanlah penyusunan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Ditinjau Dari Rasio Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015)”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan serta kerja sama berbagai pihak yang turut membantu selamapenyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Sulton, M.si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberi fasilitas untuk peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Titi Rapini,SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberi fasilitas untuk peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W, MM, Ak, CA selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi
4. David Effendi, SE, M.Si dan Arif Hartono, SE, M.SA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran-saran, petunjuk, perbaikan serta perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu melalui kegiatan belajar mengajar selama di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Kedua orang tuaku Bapak Ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa serta seluruh keluarga yang memberikan doa dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman tercinta yang memberikan semangat, dukungan dan bersedia membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Akuntansi S-1 angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh pihak yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh peneliti

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ketidaksempurnaan baik dalam pengungkapan dan penyajian karena keterbatasan dan pengetahuan peneliti. Untuk itu saran dan kritik diharapkan peneliti untuk perbaikan skripsi ini. Sekian peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Ponorogo, Agustus 2017

Peneliti

MOTTO

**“BELAJARLAH DARI KESALAHAN MASA LALU,
BEKERJA KERAS UNTUK MASA KINI DAN BERHARAP
HASIL YANG TERBAIK PADA MASA DEPAN”**

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instuisi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, Agustus 2017



(Ariestya Nur Agustiningtyas)

NIM. 13440609

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan Tidak Melanggar Kode Etik	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Anggaran.....	11
2.1.1.1 Pengertian Anggaran.....	11
2.1.1.2 Indikator Anggaran	12
2.1.1.3 Fungsi Anggaran	16
2.1.2 Pengelolaan Anggaran	19

2.1.2.1	Pengertian Pengelolaan Anggaran	19
2.1.2.2	Tujuan Pengelolaan Anggaran	20
2.1.3	Kinerja Keuangan	21
2.1.3.1	Pengertian Kinerja Keuangan	21
2.1.3.2	Indikator Kinerja	22
2.1.3.3	Pengukuran kinerja Keuangan	25
2.1.3.4	Metode Pengukuran Kinerja Keuangan	28
2.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	34
2.1.4.1	Pengertian APBD	34
2.1.4.2	Fungsi APBD	35
2.1.5	Pendapatan daerah	37
2.1.5.1	Pengertian Pendapatan Daerah.....	37
2.1.5.2	Pengelompokan Pendapatan Daerah	38
2.2	Kerangka Berfikir.....	40
2.3	Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Ruang Lingkup Penelitian	49
3.2	Jenis dan Metode Pengumpulan data	50
3.2.1	Jenis Data	50
3.2.2	Metode Pengumpulan Data.....	50
3.3	Definisi Operasional Variabel	51
3.3.1	Rasio Kemandirian Daerah.....	51
3.3.2	Rasio Desentralisasi Fiskal	52
3.3.3	Rasio Efisiensi	53
3.3.4	Rasio Keserasian.....	53
3.4	Metode Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	62
4.1.1 Gambaran Umum.....	62
4.1.1.1 Kondisi Geografis	62
4.1.1.2 Wilayah Administratif dan Kependudukan.....	63
4.1.1.3 Kondisi Objektif.....	70
4.1.2 Hasil Perhitungan Rasio.....	82
4.2 Pembahasan.....	152
4.2.1 Analisis Perhitungan Rasio.....	152

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	167
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	169
5.3 Saran Penelitian	170

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah	29
Tabel 2.2 Kriteria Derajat desentralisasi fiskal.....	30
Tabel 2.3 Kriteria efektifitas kinerja keuangan.....	31
Tabel 2.4 Kriteria efisiensi kinerja keuangan	32
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah	55
Tabel 3.2 kriteria derajat desentralisasi fiskal.....	56
Tabel 3.3 kriteria efisiensi kinerja keuangan	59
Tabel 4.1 Kriteria pengambilan sampel	65
Tabel 4.2 Daftar sampel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	70
Tabel 4.3 Dana perimbangan Kabupaten Bangkalan.....	71
Tabel 4.4 Dana perimbangan Kabupaten Bojonegoro	72
Tabel 4.5 Dana perimbangan Kabupaten Lamongan.....	74
Tabel 4.6 Dana perimbangan Kabupaten Madiun.....	74
Tabel 4.7 Dana perimbangan Kabupaten Nganjuk	75
Tabel 4.8 Dana perimbangan Kabupaten Pamekasan.....	76
Tabel 4.9 Dana perimbangan Kabupaten Sidoarjo	77
Tabel 4.10 Dana perimbangan Kabupaten Situbondo.....	78
Tabel 4.11 Dana perimbangan Kabupaten Sumenep	78
Tabel 4.12 Dana perimbangan Kabupaten Trenggalek.....	80
Tabel 4.13 Dana perimbangan Kabupaten Tuban.....	81
Tabel 4.14 Dana perimbangan Kota Malang	82
Tabel 4.15 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Bangkalan.....	83
Tabel 4.16 Analisis Rasio Desentrealisasi Fiskal Kabupaten Bangkalan.....	84
Tabel 4.17 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Bangkalan	85

Tabel 4.18	Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Bangkalan.....	86
Tabel 4.19	Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangkalan.....	87
Tabel 4.20	Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Bangkalan.....	88
Tabel 4.21	Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Bojonegoro.....	89
Tabel 4.22	Analisis Rasio Desentrealisasi Fiskal Kabupaten Bojonegoro	90
Tabel 4.23	Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Bojonegoro	91
Tabel 4.24	Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Bojonegoro	92
Tabel 4.25	Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bojonegoro.....	93
Tabel 4.26	Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Bojonegoro...	94
Tabel 4.27	Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Lamongan.....	95
Tabel 4.28	Analisis Rasio Desentrealisasi Fiskal Kabupaten Lamongan	96
Tabel 4.29	Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Lamongan	97
Tabel 4.30	Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Lamongan	98
Tabel 4.31	Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamongan.....	99
Tabel 4.32	Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Lamongan...	100
Tabel 4.33	Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Madiun	101
Tabel 4.34	Analisis Rasio Desentrealisasi Fiskal Kabupaten Madiun.....	102
Tabel 4.35	Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Madiun.....	103
Tabel 4.36	Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Madiun.....	103
Tabel 4.37	Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Madiun	104
Tabel 4.38	Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Madiun	105
Tabel 4.39	Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Nganjuk	106
Tabel 4.40	Analisis Rasio Desentrealisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk	107
Tabel 4.41	Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Nganjuk	108
Tabel 4.42	Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Nganjuk	109
Tabel 4.43	Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Nganjuk	110
Tabel 4.44	Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Nganjuk.....	111
Tabel 4.45	Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pamekasan.....	112

Tabel 4.46 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pamekasan	113
Tabel 4.47 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Pamekasan	114
Tabel 4.48 Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan	114
Tabel 4.49 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan	115
Tabel 4.50 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Pamekasan..	116
Tabel 4.51 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sidoarjo	117
Tabel 4.52 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo	118
Tabel 4.53 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Sidoarjo.....	119
Tabel 4.54 Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Sidoarjo.....	120
Tabel 4.55 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sidoarjo	121
Tabel 4.56 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Sidoarjo	122
Tabel 4.57 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Situbondo	123
Tabel 4.58 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Situbondo	124
Tabel 4.59 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Situbondo.....	125
Tabel 4.60 Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Situbondo.....	126
Tabel 4.61 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Situbondo	127
Tabel 4.62 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Situbondo ...	128
Tabel 4.63 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sumenep.....	129
Tabel 4.64 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumenep	130
Tabel 4.65 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Sumenep	131
Tabel 4.66 Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Sumenep	132
Tabel 4.67 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sumenep	133
Tabel 4.68 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Sumenep.....	134
Tabel 4.69 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Trenggalek	135
Tabel 4.70 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Trenggalek	136
Tabel 4.71 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Trenggalek.....	137
Tabel 4.72 Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Trenggalek.....	138

Tabel 4.73 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Trenggalek.....	139
Tabel 4.74 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek .	140
Tabel 4.75 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tuban	141
Tabel 4.76 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tuban	142
Tabel 4.77 Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Tuban	143
Tabel 4.78 Analisis Rasio Belanja Langsung Kabupaten Tuban	144
Tabel 4.79 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tuban.....	145
Tabel 4.80 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kabupaten Tuban	146
Tabel 4.81 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kota Malang	147
Tabel 4.82 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Malang	147
Tabel 4.83 Analisis Rasio Efisiensi Kota Malang	148
Tabel 4.84 Analisis Rasio Belanja Langsung Kota Malang	149
Tabel 4.85 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Kota Malang	150
Tabel 8.86 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keuangan Kota Malang	151
Tabel 4.87 Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio	152
Tabel 4.88 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	154
Tabel 4.89 Urutan Rasio Kemandirian Daerah dari tertinggi hingga terendah ...	154
Tabel 4.90 Pola Hubungan dan Tingkat Desentralisasi Fiskal	156
Tabel 4.91 Urutan Rasio Desentralisasi Fiskal dari tertinggi hingga terendah ...	157
Tabel 4.92 Pola Hubungan dan Tingkat Efisiensi	159
Tabel 4.93 Urutan Rasio Efisiensi dari tertinggi hingga terendah	160
Tabel 4.94 Urutan Rasio Belanja Langsung dari tertinggi hingga terendah	162
Tabel 4.95 Urutan Rasio Belanja Tidak Langsung dari tertinggi hingga terendah.....	164

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir.....	41
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur	63